

**PENERAPAN PASAL 279 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN
(Studi Putusan : No.157K/MIL/2010 dan No.17K/MIL/2012)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

LEGAR REZA IMANUL ISLAM

NIM : 125010107111217



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

**PENERAPAN PASAL 279 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN
(Studi Putusan : No.157K/MIL/2010 dan No.17K/MIL/2012)**

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

LEGAR REZA IMANUL ISLAM

NIM : 125010107111217



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 279 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (STUDI PUTUSAN NO.157K/MIL/2010 DAN NO.17K/MIL/2012)

Identitas Penulis :

a. Nama : Legar Reza Imanul Islam

b. NIM : 125010107111217

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H.M.S.,

Dr. Bambang Sugiri, S.H.M.Hum.,

NIP. 19481230 197312 1 001

NIP. 19570717 198403 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH., LLM.,

NIP. 19660710 199203 2 003

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 279 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN
(STUDI PUTUSAN : NO.157K/MIL/2010 DAN NO.17K/MIL/2012)**

**Legar Reza Imanul Islam
NIM. 125010107111217**

Skripsi ini telah disahkan oleh majelis Penguji pada Tanggal: 6 Agustus 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H.M.S.,

Dr. Bambang Sugiri, S.H.M.Hum.,

NIP. 19481230 197312 1 001

NIP. 19570717 198403 1 002

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP . 19620805 198802 1 001

Dr. Yuliati , SH.LLM.,
NIP . 19660710 199203 2 003

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunianya yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Dr. Yuliati SH., LLM, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama atas kebaikan dalam meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan dan motivasinya serta kesabarannya yang luar biasa untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kebaikan dalam meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan serta motivasinya yang sangat luar biasa dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga bagi penulis.
6. Kedua orang tua yang telah melahirkan dan merawat penulis ke dunia, telah memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, cinta kasih dan senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan atas kelancaran penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Keluarga kecil penulis dari keluarga PS 3 Tomo, Keluarga Dwiga ceria, dan Manis Manja Tersayang.

8. Seluruh teman – teman se-angkatan 2012 khususnya grup “pengen Lulus” yang telah memberikan pengalaman banyak bagi penulis dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Agustus 2018

Penulis



RINGKASAN

Legar Reza Imanul Islam, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2018, **PENERAPAN PASAL 279 AYAT (1) KUHP TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (STUDI PUTUSAN NO.157K/MIL/2010 DAN NO.17K/MIL/2012)**, Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S., Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.Hum.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penerapan Pasal 279 Ayat (1) KUHP Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan No.157K/MIL/2010 dan No.17K/MIL/2012). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya perbedaan penerapan hukum pada kedua putusan tersebut mengenai keabsahan dan keberadaan perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai bagian dalam unsur pemidanaan dalam pasal 279 Ayat (1) KUHP. Dimana pada putusan No.157K/MIL/2010 perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak dicatatkan dianggap sah dan diakui keberadaannya sehingga Terdakwa dipidana dengan pasal 279 Ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam putusan No.17K/MIL/2012 perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak dicatatkan dianggap sah dan tidak diakui keberadaannya didalam hukum sehingga Terdakwa tidak dipidana dengan pasal 279 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Mengapa terjadi perbedaan penerapan makna perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam putusan No.157K/MIL/2010 dan No.17K/MIL/2012 terkait pasal 279 Ayat (1) KUHP terhadap kasus perkawinan yang tidak dicatatkan? (2) Bagaimana pemaknaan perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dapat menjadikan kepastian hukum dalam putusan No.157K/MIL/2010 dan No.17K/MIL/2012 terkait pasal 279 ayat (1) KUHP terhadap kasus perkawinan yang tidak dicatatkan?.

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran sistematis yaitu melakukan penafsiran dengan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dari suatu peraturan perundang-undangan dan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya serta penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa yaitu dengan memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penafsiran hakim terhadap syarat sah perkawinan pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebabkan terjadinya perbedaan penerapan hukum terhadap kedua putusan terkait penerapan pasal 279 Ayat (1) KUHP terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. Sehingga hakim diharap lebih berhati-hati dalam menafsirkan pasal sehingga dapat menciptakan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

SUMMARY

Legal Reza Imanul Islam majoring Criminal Law in Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang, July 2018, APPLICATION SECTION 279 OF ARTICLES (1) Criminal Code against Unchecked MARKETS (DECISION STUDY NO.157K / MIL / 2010 AND NO.17K / MIL / 2012), Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S., Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.Hum.

In this research, the author took the issue of the Implementation of Article 279 Paragraph (1) of the Criminal Code Against Unchecked Marriages (Study of Decision No.157K / MIL / 2010 and No.17K / MIL / 2012). Theme adopted is based on the difference of the law application to both decisions regarding the validity and existence of marriage which is not listed as part of the element of punishment in Article 279 Paragraph (1) of the Criminal Code. Where the verdict of No.157K / MIL / 2010 marriage conducted by the Defendant who is not registered is considered valid and recognized its existence so that the Defendant is convicted with article 279 Paragraph (1) of the Criminal Code. Whereas, the verdict of No.17K / MIL / 2012 stated that the marriage which conducted by the unregistered Defendant is considered valid and not recognized in the law so that the Defendant will not be punished by Article 279 Paragraph (1) of the Criminal Code.

Based on the previous discussion, this paper raises the formulation of the problem: (1) Why there is a difference in the application of the meaning of legal marriage under Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) Law Number 1 Year 1974 about Marriage in decision No.157K / MIL / 2010 and No.17K / MIL / 2012 relating Article 279 Paragraph (1) of the Criminal Code against unlinked marriage cases? (2) Legalization of marriage based on Article 2 paragraph (1) and (2) of Law Number 1 Year 1974 concerning marriage which can make legal certainty in decision No.157K / MIL / 2010 and No.17K / MIL / 2012 related article 279 paragraph (1) of the Criminal Code against unregistered marriage cases?

For this, the author uses normative juridical method with the statute approach and case approach. The primary and secondary law materials obtained by the author will be analyzed by using systematic interpretation analysis technique as an interpretation of connecting one article with another article of a law and the other legislation and grammatical interpretation is the interpretation based on the grammar by giving meaning to the term or word in accordance with everyday language or legal language used as a reference in solving legal problems that become the object of study.

From the results of the research, the authors obtained the answer to the existing problems that the judge's interpretation of the legal requirements of marriage Article 2 of Law No.1 Year 1974 on marriage causes the different application of law against the two decisions related to the application of Article 279 Paragraph (1) of the Criminal Code against unregistered marriage. Thus, the judge is expected to be more careful in interpreting the article as creating a sense of justice, certainty, and benefit for the community.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Perkawinan.....	11
1. Pengertian Perkawinan.....	11
2. Syarat Sah Perkawinan.....	14
B. Kajian Umum Tentang Putusan Hakim	18
1. Pengertian Putusan Hakim	18
2. Bentuk Putusan.....	22
C. Kajian Umum Pasal 279 Ayat (1) KUHP	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Metode Pendekatan Penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	30
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	31
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	31
F. Definisi Konseptual	32

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perbedaan Makna Perkawinan Yang Sah Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Putusan No.157K/MIL/2010 dan No.17K/MIL/2012 Terkait Penerapan Pasal 279 Ayat (1) KUHP Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan	33
1. Putusan No.157K/MIL/2010	33
a. Unsur Formil	33
b. Posisi Kasus	33
c. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan No.157K/MIL/2010	38
2. Putusan No.17K/MIL/2012	53
a. Unsur Formil	53
b. Posisi Kasus	54
c. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan No.17K/MIL/2012	57
B. Pemaknaan Perkawinan Yang Sah Berdasarkan Pasal 2 Ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Dapat Menjadikan Kepastian Hukum Dalam Putusan No.157K/MIL/2010 dan No.17K/MIL/2012 Terkait Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 Terhadap Kasus Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila. Hal tersebut sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum.² Konsekuensi dari pada hal tersebut maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan. Salah satu peristiwa hukum yang juga menjadi kebutuhan manusia ialah perkawinan.

Di dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sehingga setiap Warga Negara Indonesia diakui dan dijamin haknya oleh konstitusi untuk melakukan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹Tengku Erwinsyahbana, **Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila**, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1, Hlm 1

²Lihat pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara terperinci untuk menjaga kesucian perkawinan itu sendiri. Pengertian perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina.³

Perkawinan dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia, merupakan bagian kehidupan yang bersifat sakral, sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan dari masing-masing pasangan.⁴ Di dalam agama Islam, hubungan pernikahan dikatakan sebagai ikatan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*), maka oleh karena itu pernikahan harus memperhatikan norma dan kaedah yang hidup di tengah masyarakat⁵

Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*sakinah*) dengan cara-cara yang di ridhloi Allah swt.⁶

Seiring berjalannya waktu terdapat permasalahan-permasalahan baru terkait dengan perkawinan. Permasalahan tersebut terkait dengan status hukum

³Lihat Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang **Perkawinan** yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁴ Lihat Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 **Tentang Perkawinan** yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

⁵Sartini, Abdul Bari Azed, Suzanalisa, **Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana**, Legalitas Edisi Juni 2016, Volume VIII, Nomor 1, Hlm 2

⁶Beni Ahmad Saebani, **Fiqh Munakahat 1**,Pustaka Setia, Cet. VII Bandung, 2009, Hlm 9

perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal di masyarakat sebagai perkawinan siri. Permasalahan ini terjadi karena samarnya pemahaman tentang syarat sahnya perkawinan yang akhirnya menimbulkan penafsiran yang kontradiktif di dalam penerapan hukum pidana. Syarat sahnya perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu dilakukan sah secara agama dan keyakaninan masing-masing pasangan dan kemudian dicatatkan.⁷

Perkawinan yang tidak dicatat atau nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.⁸

Permasalahan yang terkait dengan perkawinan yang tidak dicatatkan ini juga terjadi di dalam putusan-putusan pengadilan, dari pengadilan di tingkat pertama bahkan di tingkat kasasi. Salah satu permasalahan yang terjadi terkait perkawinan yang tidak dicatatkan ini menyangkut penerapan pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.

⁷Lihat pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**

⁸Abdullah Jayadi, **Fenomena Nikah Sirri Presfektif Makna Pelaku Nikah Sirri**, Putra Media Nusantara, Cet. I, Surabaya, 2012, Hlm. 4.

Secara umum pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana bigami yang dikaitkan terhadap perkawinan terlarang. Tindak pidana bigami yang dimaksud disini adalah pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami. Hal tersebut dapat kita lihat dari pasal 3 sebagai berikut:

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Maka jelas apa bila kita melihat substansi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan setiap orang hanya boleh menikah satu kali, akan tetapi seorang suami bisa menikah lagi atas izin dari pengadilan berdasarkan kehendak para pihak yang bersangkutan.

Putusan hakim pada hakikatnya merupakan ujung tombak dalam sebuah sistem hukum demi tercapainya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam hukum. Putusan hakim atau pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti, ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.⁹

⁹H. Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 199

Putusan hakim adalah putusan penegak hukum, bahkan hukum itu sendiri, yang dapat menggambarkan banyak hal tentang dan mengenai dunia ke-hakiman dan kehukuman kita.¹⁰ Pentingnya putusan hakim sangat berdampak pada kehidupan hukum yang ada di dalam masyarakat. Karena putusan hakimlah yang akan menciptakan kepastian dalam kehidupan hukum terkait peristiwa hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.¹¹

Dalam pelaksanaanya hakim diberikan kebebasan untuk menilai dan memutus suatu perkara yang datang kepadanya. Putusan hakim juga tidak terikat dengan putusan hakim yang lain atas perkara yang sama sehingga sering kali terdapat perbedaan penerapan hukum terhadap tindak pidana yang sama.

Penerapan hukum yang berbeda atas perkara yang sama dapat menimbulkan konflik hukum yang terkait rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan juga bagi terpidana. Sebagai contoh adalah putusan MA No.157k/MIL/2010

¹⁰Amzulian Rifa'i, Suparman Marzuki, Andrey Sujatmoko, **Wajah Hakim Dalam Putusan (Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia)**, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm 8

¹¹Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm. 100

pada tanggal 20 Agustus 2010 terkait tindak pidana terhadap perkawinan Pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengakui keabsahan perkawinan siri. Dalam putusan No.157K/MIL/2010 Terdakwa Sumarno telah terikat perkawinan dengan Sdri. Solikah kemudian melakukan perkawinan secara siri dengan Sdri. Yuliana. Atas perbuatan tersebut Terdakwa diputus bersalah melanggar ketentuan pasal 279 Ayat (1) KUHP dan dipidana 6 bulan penjara dalam putusan di pengadilan tingkat pertama. Kemudian di Pengadilan tingkat banding Terdakwa diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Namun juga terdapat putusan MA No.17K/MIL/2012 terkait tindak pidana terhadap perkawinan Pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tidak mengakui keabsahan perkawinan siri. Dimana dalam putusan No.17K/MIL/2012 Terdakwa Ahmad Yusuf melakukan perkawinan secara siri dengan Sdri. Ety Soemiyati. Kemudian Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Aan Tripiyanti. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 279 Ayat (1) KUHP dan diputus bebas. Perbedaan penerapan hukum inilah yang menimbulkan konflik hukum terkait rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi terpidana.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam berkaitan dengan penerapan pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perkawinan siri yang dijabarkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Perkawinan**

repository.ub.ac.id

Yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan: NO.157K/MIL/2010 Dan NO.17K/MIL/2012)”.

B. Rumusan masalah

1. Mengapa terjadi perbedaan penerapan makna perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam putusan No.157k/mil/2010 dan No.17k/mil/2012 terkait penerapan pasal 279 ayat (1) KUHP terhadap kasus perkawinan yang tidak dicatatkan?
2. Bagaimana pemaknaan perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat menjadikan kepastian hukum dalam putusan No.157k/mil/2010 dan No.17k/mil/2012 terkait penerapan pasal 279 ayat (1) KUHP terhadap kasus perkawinan yang tidak dicatatkan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini merupakan bentuk sumbangan pikiran yang bermanfaat khususnya dibidang ilmu pengetahuan hukum mengenai penerapan pasal 279 ayat (1) terhadap kasus perkawinan yang tidak dicatatkan dalam putusan pengadilan yang terkait:

- a. Untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan penerapan makna perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam putusan No.157k/mil/2010 dan No.17k/mil/2012 terkait pasal 279 ayat (1) terhadap kasus perkawinan yang tidak dicatatkan.

- b. Untuk mengetahui pemaknaan perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat menjadikan kepastian hukum dalam putusan No.157k/mil/2010 dan No.17k/mil/2012 terkait pasal 279 ayat (1) terhadap kasus perkawinan yang tidak dicatatkan.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan penerapan hukum pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wawasan terhadap mahasiswa fakultas hukum terkait dengan penerapan pasal 279 ayat (1) terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.

b. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan. Sehingga putusan yang dijatuhkan memenuhi kepastian hukum bagi terdakwa maupun bagi masyarakat serta

menjadi indikator yang dapat digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan kepada masyarakat terkait dengan adanya penerapan hukum pasal 279 ayat (1) terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisikan uraian latar belakang penulis membahas permasalahan yang kemudian dilanjutkan dengan merumuskan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini penulis menguraikan teori-teori yang menjadi landasan penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan penerapan pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan dalam putusan nomor No.157k/mil/2010 dan No.17k/mil/2012.. Tinjauan pustaka meliputi tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum tentang perkawinan, dan tinjauan umum tentang pasal 279 Ayat (1) KUHP.

BAB III**METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yurdis normatif. Bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil dan pembahasan dari penelitian dengan cara mendeskripsikan mengenai penerapan pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perkawinan siri dalam putusan hakim terkait kasus kejahatan terhadap perkawinan dalam putusan No.157k/mil/2010 dan No.17k/mil/2012, serta mengenai keadilan substantif dari putusan tersebut.

BAB V**PENUTUP**

Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan berisi tentang garis besar dari pembahasan yang akan menjawab permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian. Saran merupakan rekomendasi dari penulis tentang penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut Ahmad Ashar Bashir, Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah sedangkan menurut Zahry Hamid mengatakan pendapatnya bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.¹

Dalam keputusan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim.²

Pengertian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk

¹<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html>
diakses 24 April 2018 Pukul 20 : 10 WIB

²MR Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Karya Gemilang, Jakarta, Cet. Ketiga, 2011, Hlm. 2

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Beranjak dari definisi Pasal 1 UU perkawinan saja sudah jelas terbesit betapa kentalnya nuansa agamawi mewarnai hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, pilihan ini antara lain didasarkan pada suatu fakta, bahwa bangsa Indonesia yang memiliki dasar Pancasila, benar-benar harus dijadikan landasan saat membuat aturan hukum, termasuk waktu merakit UU Perkawinan.⁴

Berdasarkan pada pengertian perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka perkawinan memiliki lima unsur, yaitu:⁵

1. Ikatan lahir batin.
2. Antara seorang pria dan seorang wanita.
3. Sebagai suami istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqa ghaliiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya

³ Lihat pada pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Moch. Isnaeni, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm. 37

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**, Airlangga University, 1988, Hlm 38

⁶ Lihat Pada Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang **Kompilasi Hukum Islam**

ketenangan, kenyamanan bagi suami-isteri, serta anggota keluarga yang lain. Islam dengan segala kesempurnanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu, perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai bagian dari kehidupan dalam masyarakat.

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami-isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam hubungan keluarga.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang prinsipil, karenanya perkawinan erat kaitannya dengan segala hal akibat perkawinan, baik menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang dituangkan dalam Pasal 2, sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

2. tiap-tiap perkawinan di catat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

2. Syarat sah perkawinan

Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan syarat sahnya perkawinan yaitu harus:

- a. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan;
- b. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak 21 serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

⁷Lihat Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**

- c. Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun;
- d. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun;
- e. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan;
- f. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan;
- g. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;
- h. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu;
- i. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.⁸

⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**

Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, serta Pasal 14 sampai dengan Pasal 29, yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;

Syarat-syarat calon mempelai:

- 1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya;
- 2) Keduanya sama-sama beragama Islam;
- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan;
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya;

5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan

c. Wali dari nikah mempelai perempuan;

Syarat-syarat wali:

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat;
- 2) Laki-laki. Tidak boleh perempuan;
- 3) Muslim;
- 4) Orang merdeka;
- 5) Tidak berada dalam pengampuan;
- 6) Berpikiran baik;
- 7) Adil;
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

d. Dua orang saksi;

Syarat-syarat saksi berdasarkan pasal 24, 25, 26 kompilasi hukum islam No.1 Tahun 1991 :

- 1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang;
- 2) Kedua saksi itu adalah bergama Islam;
- 3) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka;
- 4) Kedua saksi itu adalah laki-laki;
- 5) Kedua saksi itu bersifat adil;
- 6) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat;

- 7) Kedua saksi hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

e. Ijab dan Qabul

Dalam pasal 27 dijelaskan bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Syarat-syarat akad nikah berdasarkan pasal 29 yaitu:

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon pria secara pribadi;
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan bahwa calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria;
- 3) Apabila calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan.⁹

B. Kajian Umum tentang Putusan Hakim

1. Pengetian Putusan hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta,

⁹Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.¹⁰ Apabila ditinjau dari visi teoritis dan praktik maka putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹¹

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.¹² Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.¹³

¹⁰Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)**, Mandar Maju, Bandung. 2010. Hlm 92

¹¹Lilik Mulyadi, **Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

¹²Tri Andrisman, **Hukum Acara Pidana**, Universitas Lampung, Lampung, 2010, hlm, 68.

¹³Lihat Pada Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak menerima atas putusan tersebut.¹⁴

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:¹⁵

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan dan beritaacara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Putusan hakim dapat di kelompokkan menjadi 2 jenis yaitu :

a. Putusan Akhir

¹⁴Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif**. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 203

¹⁵Lihat Pada Pasal 50 dan Pasal 51 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang **Kekuasaan Kehakiman**

Putusan hakim ini terjadi pada saat hakim telah memeriksa terdakwa sampai pada pemeriksaan pokok perkara selesai diperiksa. Dalam pemeriksaan pokok perkara sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses yaitu pada saat sidang telah dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” umum, pemeriksaan identitas terdakwa dan memberikan peringatan agar mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa dan/atau penasehat hukum dan pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan/pledoi, replik, duplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup”, musyawarah hakim, dan pembacaan putusan pada sidang yang terbuka untuk umum.¹⁶ Dilanjutkan dengan penandatanganan hakim dan panitera setelah adanya pengucapan putusan oleh hakim.¹⁷

b. Putusan yang merupakan bukan putusan akhir

Pada putusan ini dapat berupa putusan sela, yang mengacu pada ketentuan pasal 148 KUHAP dan 156 ayat 1 KUHAP dalam hal pelimpahan perkara apabila terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Jenis putusan ini dapat berupa penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara.¹⁸ Atau adanya suatu putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal tersebut ditegaskan di dalam

¹⁶Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

¹⁷*Ibid*

¹⁸ *Ibid*

pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP maupun adanya putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena materi perkara tersebut telah kadaluarsa, telah *nebis in idem*, atau materi perkara tersebut merupakan perkara perdata.¹⁹

2. Bentuk Putusan

a) Putusan bebas (*vrijsppraak*)

Menurut pasal 191 ayat 1 KUHAP putusan bebas dilakukan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.²⁰

Berikut terdapat beberapa syarat seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas:

1. Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah

Terdapat tiga unsur pada syarat yang pertama ini yaitu adanya suatu kesalahan, kesalahan tersebut tidak terbukti, dan yang terakhir ialah pembuktian dari kesalahan tersebut terbukti secara sah tidak memenuhi unsur-unsur dalam pembuktian.²¹

Menurut M. Yahya Harahap, pasal 191 ayat 1 KUHAP dapat diperluas maknanya dengan syarat-syarat putusan bebas yang dapat dikaitkan dengan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam

¹⁹*Ibid*

²⁰Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

²¹Tolib Effendi, **Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana**, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 182

KUHAP.²² Hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan adalah adanya alasan pembeda dan pemaaf. Alasan pemaaf dan pembeda dalam hukum pidana ialah:²³

- Karena adanya gangguan pada kejiwaan terdakwa yang disebabkan oleh penyakit (pasal 44 KUHP)
- Terdakwa belum cukup umur (pasal 45 KUHP)
- Adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik daya paksa fisik maupun batin (pasal 48 KUHP)
- Pembelaan terpaksa (pasal 49 KUHP)
- Melakukan perbuatan karena perintah Undang-Undang (pasal 50 KUHP).

Menurut Andi Hamzah antara alasan pembeda dan pemaaf memiliki konsekuensi yang berbeda, alasan pembeda meniadakan unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan sehingga harus diputus bebas sedangkan pada alasan pemaaf meniadakan kesalahan sehingga putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum.²⁴

Kedua pendapat dari para sarjana yang telah dijelaskan diatas mendasarkan pada sumber yang sama yakni alasan peniadaan pidana yang sebagaimana diatur dalam Bab III Buku I KUHP.

²²M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 349

²³*Ibid.*, hlm. 350

²⁴Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 144

Peniadaan pidana dapat terjadi karena unsur melawan hukum pada perbuatan terdakwa tidak terbukti, dan memang tidak ada.

Kemudian apabila melihat rumusan dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP yang menyatakan apabila unsur kesalahan tidak terbukti maka tidak ada unsur kesalahan pada terdakwa. Kesalahan menurut Utrecht dapat diartikan dalam 3 hal yaitu: kemampuan bertanggungjawab dari seorang terdakwa, hubungan batin antara perbuatan dengan terdakwa dan tidak adanya alasan penghapusan pidana.²⁵

Unsur selanjutnya berkaitan dengan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa secara sah dan menyakinkan yang artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur syarat sah pembuktian yang dijelaskan dalam pasal 183 KUHAP yaitu seseorang dapat dibuktikan kesalahannya memerlukan sekurang-kurang 2 alat bukti yang sah.

Dalam pasal 183 KUHAP mengandung 2 asas sekaligus yakni:

- Asas pembuktian

Menurut Undang-Undang prinsip hukum pembuktian disamping adanya kesalahan terdakwa harus juga diikuti oleh keyakinan hakim atas kebenaran kesalahan terdakwa.

- Asas batas minimum pembuktian

²⁵Tolib Effendi, **Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia**, Setara Press, Malang, 2014. hlm. 184

Batas minimum pembuktian dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah.

Yang kemudian apabila dihubungkan dengan pasal 191 ayat 1 KUHAP, putusan bebas pada umumnya berdasarkan atas penilaian serta pendapat hakim itu sendiri berdasarkan:

- Kesalahan terdakwa yang sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan sama sekali tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa.
- Secara nyata hakim menilai pembuktian atas kesalahan terdakwa tidak memenuhi batas minimum pembuktian.²⁶

2. Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan

Bahwa pada saat pembuktian, hakim tidak menemukan adanya kekuatan dalam pembuktian. Terdakwa tidak memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana.

b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti kesalahannya dan perbuatan terdakwa bukan suatu bentuk tindak pidana maka terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum.²⁷ Terdapat syarat-syarat pada putusan lepas dari segala hukum yang terdiri dari:

²⁶M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 348

²⁷Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

1. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah tidak memenuhi rumusan pasal 184 KUHP.

2. Perbuatan terdakwa bukan suatu tindak pidana

Walaupun telah terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam rumusan pasal 184 KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana melainkan perbuatan tersebut merupakan suatu perkara perdata sehingga terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c) Putusan Pemidanaan

Diatur pada pasal 193 ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwa pemidanaan didasarkan pada penilaian hakim yang berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan atas dirinya yang kemudian dilakukan penjatuhan hukuman pidana, atau apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur pada pasal 184 KUHP ataupun setidaknya telah memenuhi batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP.

Undang-undang memberikan kebebasan terhadap hakim untuk menjatuhkan pidana dengan hukuman minimum atau maksimum yang berdasarkan pada pasal pidana yang dilanggarnya, hal tersebut juga dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1983 No. 553 K/Pid/1982 yang menegaskan bahwa hukuman

merupakan suatu wewenang *judex factie* pengadilan Negeri dan pengadilan tinggi.²⁸

C. Kajian Umum tentang Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP BAB XIII Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan kita dapat mencermati Pasal 279 Ayat (1):

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

- (1) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- (2) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Dalam pasal tersebut pada butir ke (1) disebutkan bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Sehingga seseorang tidak dapat melakukan perkawinan apabila telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁹ Karena pada dasarnya di dalam sistem hukum Indonesia yang terkait dengan hukum perkawinan menganut asas monogami

²⁸M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 354

²⁹Lihat Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Seseorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini”.

seperti yang telah diatur dalam pasal pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁰

Dalam penjelasan Pasal 279 KUHP, menyatakan bahwa menurut peraturan pernikahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang tidak diperbolehkan kawin untuk kedua kalinya ialah orang yang tunduk pada peraturan itu, yakni orang-orang Eropah, Indonesia, Tionghoa dan lain-lain, yang beragama Kristen, serta bagi mereka perkawinan yang pertama itu sudah merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi dan apabila mereka kawin lagi, dapat dituntut menurut Pasal ini.³¹

Menurut R Soesilo dalam penjelasan Pasal 279 KUHP menyatakan suatu syarat orang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang itu harus mengetahui, bahwa dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan.³²

³⁰Lihat Pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Padaasasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”.

³¹Selamat Widodo, **Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan Oleh Prajurit TNI**, Jurnal Kosmik Hukum Edisi Juni 2016, Vol.16 NO.2, Hlm 3

³²R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor, Hlm 203

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim terkait penerapan pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah dengan menggunakan pendekatan *statute approach* atau pendekatan undang-undang, yang nantinya peneliti akan mengkaji peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 279 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan putusan yang akan dianalisis oleh penulis. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus atau *case approach* karena pada penelitian menggunakan putusan-putusan hakim yang terkait dengan penerapan pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu putusan kasasi putusan No.157k/mil/2010 dan putusan No.17k/mil/2012.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum penelitian yang digunakan oleh peneliti terdiri dari:

a) **Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Berikut ini merupakan bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti ialah:

1. Putusan Nomor 157K/MIL/2010.
2. Putusan Nomor 17K/MIL/2012.
3. Putusan Nomor PUT/64-K/PM.II-10/AD/I/2010.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
8. Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan penjelasannya

b) **Bahan Hukum Sekunder**

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, selain itu penulis juga menggunakan kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait pasal 279 Ayat (1) KUHP. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan baik jurnal, skripsi, disertasi ataupun tesis, majalah, dan tulisan-tulisan hukum yang berkaitan dengan pasal 279 Ayat (1) KUHP dan perkawinan. Bahan hukum tersier diperoleh dengan menggunakan media internet guna memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti melakukan penafsiran dengan metode sistematis yaitu melakukan penafsiran dengan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dari suatu peraturan perundang-undangan dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran yang digunakan adalah sebagai berikut: ¹

¹Amiruddin Dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008

1. Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa yaitu dengan memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
2. Penafsiran sistematis yaitu jika suatu istilah atau perkataan yang dicantumkan lebih dari satu kata dalam suatu pasal atau suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula.

F. Definisi Konseptual

1. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.
2. Pasal 279 KUHP merupakan pasal yang menjelaskan terkait kejahatan terhadap perkawinan dimana seseorang diancam dengan pidana paling lama lima tahun penjara apabila mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
3. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan dan sah secara agama tetapi tidak dilakukan pencatatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perbedaan Penerapan Makna Perkawinan Yang Sah Berdasarkan Pasal 2

Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Putusan No.157k/mil/2010 dan No.17k/mil/2012Terkait pasal 279

Ayat (1) Terhadap Kasus Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

1. Putusan No.157k/mil/2010

a. Unsur Formil

Nama : SUMARNO

Pangkat : Serka / 21930094180371

Jabatan : Balaklap Lidkrim Pamfik

Kesatuan : Pomdam IV / Diponegoro

Tempat Lahir : Malang

Tanggal Lahir : 10 Maret 1971

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum Sedayu Kelapa RT. 04 RW. 01, Kelurahan

Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang

b. Posisi Kasus

Terdakwa yang bernama Sumarno yang merupakan anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) berpangkat Serka didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar pasal 279 Ayat (1) Ke-1

KUHP. Di dalam putusan No.157k/mil/2010 Oditur militer menjelaskan dalam surat dakwaannya terkait rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dijadikan dasar oleh Oditur militer sebagai landasan untuk menuntut Terdakwa didalam persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Maret tahun 2000 sembilan setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan di Dukuh Srendeng RT. 04 RW. 04 Desa Karang Sari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk XI di Pusdik Pom Cimahi pada tahun 1992/1993. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susjurba Pom di Pusdik Pom Cimahi selama 5 (lima) bulan.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Solikah (Saksi-6) Pada tanggal 28 Mei 1996 di kantor KUA Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Pro pinsi Jawa Tengah sesuai Kutipan Akte Nikah dari KUA Mranggen Nomor: 221/136/V/1996 tanggal 28 Mei 1996 dimana dari

hasil pernikahannya dengan Saksi-6 (Solikah) telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki yang bernama Aditya Saga Dirgantara umur 12 (dua belas) tahun dan Riko Reza Nugroho umur 11 (sebelas) tahun.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Yuliana) di Wisma Yukarti Lokalisasi Gambilangu Semarang sebagai Mucikari yang kemudian dilanjutkan dengan menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa selanjutnya hubungan Terdakwa dan Saksi-2 (Yuliana) semakin intim lalu beberapa minggu kemudian, Terdakwa mengajak Saksi-2 (Yuliana) untuk melakukan hubungan badan di Wisma Yukarti lokalisasi Gambilangu Semarang, maka setiap Terdakwa datang ke Wisma Yukarti tersebut menjumpai Saksi-2 (Yuliana) selalu melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Yuliana) setelah selesai kerja ataupun bila Terdakwa kangen.
5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menikah lagi secara siri dengan Yuliana (Saksi-2) di rumah Bapak Rasman dengan alamat Dukuh Srendang Rt. 04 Rw. 04 Desa Karang Sari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal tanpa ada ijin dari Saksi-6 (Solikah) selaku istri sahnyanya, yang menikahkan adalah Saksi-5 (Sdr. Muh. Asmuni) selaku penghulu dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Saksi-6 yaitu (Sdr. Rasman) dan bertindak sebagai Saksi pernikahan siri adalah Sdr.

Rupi'i (Saksi-2) Sdr. Jarwadi dan teman Terdakwa yang bernama Sdr.Tono.

6. Bahwa Terdakwa pada saat melaksanakan pernikahan siri terlebih dahulu Terdakwa melaksanakan ijab kabul yang dipandu oleh Kyai Asmuni (Saksi-5) sebagai penghulu (amil), dengan mengucapkan ijab : "Saya nikahkan Sdri. Yuliana binti Rasman dengan Sdr. Sumarno bin Sawi dengan mas kawin (mahar) uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian Terdakwa mengucapkan kabul sebagai berikut : "Saya terima nikahnya Sdri. Yuliana binti Rasman dengan mas kawin (mahar) uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai".
7. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pernikahannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya, karena Terdakwa pada saat melakukan pernikahan dengan Sdri. Yuliana (Saksi-2) masih terikat pernikahan dan belum cerai dengan istri yang sah yaitu Saksi-6 (Solikah) sesuai Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 1996 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi-6 (Solikah) di Jalan Jagalan Rt. 01 Rw. 02 Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
8. Bahwa Sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer ketidak hadirannya tanpa ijin dengan sengaja dalam waktu damai (THTI) pada tahun 2008 dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah berkekuatan

hukum tetap (BHT) Nomor : PUT/74-K/PM.II-10/AD/XI/2008 tanggal 25 November 2008, kedua pernah dijatuhi hukuman disiplin (Kumplin) karena telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya (Solikah) dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 7 (tujuh) hari dengan nomor : Skep/01/VI/2000 tanggal 12 Juni 2000, ketiga pernah dijatuhi hukuman disiplin (kumplin) karena telah membiarkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh istrinya terhadap korban Sdri. Yeni di lokasi Sunan Kuning Semarang dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat 14 (empat belas) hari dengan Nomor : Skep/04/XII/2001 tanggal 6 Desember 2001, keempat, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin (kumplin) karena yang bersangkutan tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan secara terus menerus selama 29 (dua puluh sembilan) hari dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 14 (empat belas) hari dengan Nomor : Skep/02/IX/2002 tanggal 27 September 2002, kelima Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin (kumplin) dengan Nomor : Skep/01/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003 karena THTI selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut dan oleh Anjum menjatuhkan hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 14 (empat belas) hari, keenam, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin (kumplin) dengan Nomor : Skep/01/V/2005 tanggal 31 Mei 2005, dikarenakan Terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada 3 (tiga) orang tahanan yang ada di

Denpom IV/5 Semarang An. Sertu Abdul Haris, Kesatuan Ajendam IV/Diponegoro, An. Praka Paulus Denhubdam IV/Diponegoro (Terdakwa THTI), An. Koptu Iman Budi S. Denmadam IV/Diponegoro (Terdakwaasusila) dan dengan berasalan akan membantu menyelesaikan perkaranya, ketujuh, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin (kumplin) dengan nomor : Skep/237/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 oleh Ankum karena selama 2 (dua) bulan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan gaji kepada istri dan keduaanaknya dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 7 (tujuh) hari dan semuanya penjatuhan kumplin terhadap Terdakwa dicatat dalam buku hukuman dan buku data personil yang bersangkutan.

Dalam putusan No.157k/mil/2010 Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Serka Sumarno dan menyatakan bahwa judex facti (Pengadilan Militer Tinggi) dalam putusan tingkat banding No.PUT/64-K/PMT-II/AD/VI/2010 telah benar dalam menerapkan hukum.

c. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan No.157k/mil/2010

Dalam putusan No.157k/mil/2010 Majelis hakim Kasasi membacakan terlebih dahulu putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No.PUT/64-K/PM-II-10/AD/I/2010 yang menyatakan bahwa Terdakwaatas nama Sumarno yang berpangkat Serka NRP.21930094180371 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan Perkawinan, padahal

mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Kemudian pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-.

Selain itu Majelis Hakim Kasasi juga membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No.PUT/62-K/PMT-II/AD/VI/2010 tanggal 16 juni 2010 yang menyatakan bahwa menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sentot Rahardiyono, SH yang berpangkat Kapten Chk Nrp.522893, dan memperbaiki putusan pengadilan militer II-10 Semarang No.PUT/64-K/PM.II-10/AD/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 sekedar mengenai pidana pemecatan sehingga terdakwa mendapatkan pidana tambahan yang berupa pemecatan dari Dinas Militer. Sehingga pada intinya putusan No.PUT/62-K/PMT-II/AD/IV/2010 pada Pengadilan Tingkat banding menguatkan putusan No.PUT/64-K/PM.II-10/AD/I/2010 pada pengadilan tingkat pertama serta membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,-.

Dari uraian putusan pengadilan terseut diatas, maka terdapat sebuah kesamaan atau kesepakatan dari pengadilan tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum “mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, dimana perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan.

Jika kita lihat dalam putusan N0.157k/mil/2010 majelis hakim kasasi menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat banding dalam putusan No.PUT/62-K/PMT-II/AD/IV/2010 telah benar dalam menerapkan hukum dan pada intinya putusan No.PUT/62-K/PMT-II/AD/IV/2010 memperbaiki putusan pada pengadilan tingkat pertama putusan No.PUT/64-K/PM.II-10/AD/I/2010 sebatas dalam penambahan pidana yaitu terkait pidana pemecatan dari dinas militer, sehingga kita menganalisis terkait fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hakim terkait perkara ini yang ada didalam putusan tingkat pertama tersebut. Karena terkait kewenangannya bahwa yang berwenang untuk memeriksa duduk perkaranya merupakan kewenangan dari pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Sedangkan pengadilan tingkat kasasi hanya berwenang memeriksa penerapan hukumnya yang ada dalam putusan-putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Dalam putusan No.PUT/64-K/PM.II-10/AD/I/2010 Majelis terlebih dahulu menanggapi beberapa hal yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana didakwakan kepada Terdakwa.

Berdasarkan surat dakwaan dari oditur militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- Unsur Ke-1 : Barang siapa.
- Unsur Ke-2 : Mengadakan perkawinan
- Unsur ke-3 :Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah

Untuk itu unsur-unsur tersebutlah yang nantinya harus terpenuhi untuk dapat mempidanakan terdakwa dengan menggunakan pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur Ke-1 : Barang Siapa

Dalam KUHP di jelaskan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan diterapkan kepada setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.¹ Sehingga pada hakikatnya yang dimaksud barang siapa dalam unsur yang ke-1 ini ditujukan kepada Orang selaku subjek hukum. Sedangkan yang dimaksud orang disini ialah semua orang Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan juga tidak terkecuali Anggota TNI.

Unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini ialah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa dan dapat mempertanggungjawabkan terkait perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam surat dakwaan.

¹Lihat pada pasal 2 **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang menyatakan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”

Dalam unsur yang ke-1 “Barang Siapa” ini terdapat beberapa fakta-fakta yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk meyakini bahwa unsur ini telah terpenuhi, yaitu :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan secaba milsuk XI di Pusdik Pom Cimahi pada tahun 1992/1993 yang kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susjurba Pom di Pusdik Pom Cimahi selama 5 bulan.
2. Pada tahun 1993 ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 219130094180371.
3. Dengan kapasitas dan jabatan Terdakwa tersebut ketika melakukan perbuatan tersebut ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat perkara ini berjalan masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.
4. Selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain para Terdakwa di atas yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi. Hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa merupakan “Orang” yang dapat atau telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum dalam pengertian “Barang

Siapa” pada perkara ini. Karena dari uraian pertimbangan majelis hakim di atas membuktikan bahwa Terdakwa merupakan anggota militer aktif hingga perkara ini berjalan yang berarti Terdakwa merupakan Anggota TNI yang berarti Terdakwa merupakan “Orang” seperti yang telah ditentukan dalam KUHP bahwa ketentuan dalam perundangan-undangan diterapkan kepada setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

Unsur Ke-2 : Mengadakan Perkawinan

Sebelum masuk dalam pertimbangan-pertimbangan mengenai unsur “Mengadakan Perkawinan” ini, terlebih dahulu majelis hakim mengemukakan pendapatnya yang menjadi landasan berpikir hakim dalam memeriksa dan meyakini bahwa unsur “mengadakan perkawinan” dalam perkara ini telah terpenuhi atau tidak terpenuhi. Landasan berpikir inilah yang menjadi sangat penting dalam putusan ini.

Majelis hakim berpendapat bahwa :

1. Perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 pasal (1) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Dalam pasal 2 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu

Setelah melihat pendapat dari Majelis hakim dalam putusan No.PUT/64-K/PM.II-10/AD/I/2010, terdapat fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi. Berikut fakta yang terungkap dalam persidangan dalam putusan No.PUT/64-K/PM.II-10/AD/I/2010 :

1. Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 pukul 09.00 WIB Terdakwa menikah siri atau secara Islam dengan Saksi-6 (Yuliana) di rumah Bapak Rasman dengan alamat Dukuh Srendeng Rt. 04 Rw. 04 Desa Karang Sari Kec. Kendal Kab. Kendal.
2. Dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-6 (Yuliana) yang bertindak selaku wali nikah adalah orang tua Saksi-6 (Yuliana) yaitu Sdr. Rasman (Saksi-3) sedangkan yang menikahkan diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-4 (kyai Asmuni) selaku penghulu dan bertindak sebagai saksi pernikahan siri adalah Sdr. Jarwadi dan Sdr. Tono.
3. Pada waktu melaksanakan pernikahan siri tersebut terlebih dahulu Terdakwa melaksanakan ijab kabul yang dipandu oleh Kyai Asmuni (Saksi-5) sebagai penghulu (amil), dengan mengucapkan ijab : "Saya nikahkan Sdri. Yuliana binti Rasman dengan Sdr. Sumarno bin Sawi dengan mas kawin (mahar) uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian Terdakwa mengucapkan kabul sebagai berikut : "Saya terima nikahnya Sdri. Yuliana binti

Rasman dengan mas kawin (mahar) uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai".

4. Setelah Saksi-6 (Yuliana) menikah dengan Terdakwa, Saksi-6 tinggal bersama Terdakwa di rumah kontrakan milik Bpk. H. Taif dengan alamat Dukuh Ngaglik Rt. 01 Rw. 09 Kel. Kutoarjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal namun selama dalam pernikahan tidak dikaruniai anak.

Berdasarkan uraian dalam fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi, serta pendapat Majelis Hakim sebelum uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

1. Telah terjadi perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-6 (Yuliana) yang dilakukan secara siri.
2. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan itu sah jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama masing-masing
3. Dengan demikian perkawinan siri antara Terdakwa dengan Saksi-6 adalah sah.

Dari uraian pendapat majelis, pertimbangan fakta-fakta dalam persidangan dan juga kesimpulan dari majelis, maka majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Mengadakan Perkawinan" telah terpenuhi.

Dalam uraian pendapat dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No.PUT/64-K/PM.II-10/AD/I/2010 di atas dapat kita lihat bahwa Majelis Hakim menafsirkan pasal (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait syarat sah nya perkawinan sebagai pasal yang terpisah antara pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 Ayat (2).

Pernyataan tersebut dapat kita lihat dalam pendapat Majelis Hakim yang menyatakan “bahwa dalam pasal 2 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dari pendapat tersebutlah hakim berkesimpulan bahwa Perkawinan Terdakwa yang dilaksanakan dengan Saksi-6 (Yuliana) yang dilakukan secara Hukum Islam dan tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang sah secara hukum. Sehingga perkawinan Terdakwa dan Saksi-6 (Yuliana) tersebut dianggap sah secara hukum dan memenuhi unsur “Mengadakan Perkawinan” dalam putusan No.PUT/64-K/PM.II-10/AD/I/2010.

Unsur Ke-3 : Padahal mengetahui bahwa perkawinann atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Dalam putusan No.PUT/64-K/PM.II-10/AD/I/2010 Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya terkait unsur “padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawian-perkawinannya yang telah ada menjadi

penghalang yang sah untuk itu” terkait perkara ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Kata-kata “Padahal Mengetahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja”, berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa perkawinan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi namun si pelaku tetap saja melakukan yang baru tersebut.
2. Yang dimaksud dengan “perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” dapat ditegaskan bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria yang telah mempunyai istri dapat kawin lagi bila hal itu diperbolehkan menurut ajaran agamanya dan untuk itu telah mendapat ijin dari istrinya yang telah ada.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan maupun dari BAP pendahuluan, bahwa telah terungkap fakta-fakta terkait dengan perkara ini. Fakta-fakta tersebut yang menjadi dasar

pertimbangan Majelis Hakim dalam menyimpulkan keterbuktian Terdakwa terkait unsur yang ke-3 dalam Perkara ini. Fakta-fakta tersebut ialah:

1. Terdakwa telah menikah dengan Saksi-5 (Solekah) pada tanggal 28 Mei 1996 di Kantor KUA Kec. Mranggen, Kab. Demak sesuai Kutipan Akte Nikah dari KUA Mranggen Nomor 221/136/V/1996 tanggal 28 Mei 1996.
2. Dari hasil pernikahannya dengan Saksi-5 (Solekah) dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki yang bernama Aditya Saga Dirgantara umur 12 (dua belas) tahun dan Riko Reza Nugroho umur 11 (sebelas) tahun.
3. Pada bulan agustus 2008 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-6 (Yuliana) di Wisma Yukarti lokalisasi Gambilangu Semarang sebagai mucikari kemudian dilanjutkan hubungan pacaran.
4. Hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 (Yuliana) semakin intim sehingga Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-6 di Wisma Yukarti lokalisasi Gambilangu Semarang, dan setiap Terdakwa datang ke Wisma Yukarti tersebut selalu menjumpai Saksi-6 dan selalu melakukan hubungan layaknya suami istri.
5. Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 pukul 09.00 WIB Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-6 yang dilakukan secara siri atau secara agama Islam di rumah Bapak Rasman dengan alamat Dukuh Srendeng Rt. 04 Rw. 04 Desa Karang Sari Kec. Kendal Kab. Kendal.

Dari uraian fakta-fakta di atas berdasarkan keterangan Terdakwa serta keterangan para Saksi di dalam persidangan, serta berdasarkan kepada pendapat Majelis Hakim yang telah dikemukakan terkait unsur ke-3 terkait “padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” Majelis Hakim menyimpulkan bahwa:

1. Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-5 (Solekah) dan sampai dengan Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-6 (Yuliana) Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-5.
2. Sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa pernikahannya dengan Saksi-5 akan menjadi penghalang bagi pernikahannya dengan Saksi-6 karenanya Terdakwa melakukan perkawinannya dengan Saksi-6 secara siri.
3. Perkawinannya dilakukan secara siri adalah dikarenakan Terdakwa tidak ijin Saksi-5 selaku istri sahnyanya.

Dari uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang berasal dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dan juga pendapat dari Majelis Hakim sebelumnya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang Ke3 “padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Apabila kita melihat dari pada pendapat serta fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan, unsur yang ke-3 memang sudah terpenuhi. Terdakwa masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan Saksi-5 (solekah), sehingga patut bagi Terdakwa menyadari apabila terdakwa ingin melaksanakan perkawinan lagi, Terdakwa harus mendapatkan izin dari pengadilan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²

Dalam putusan No.PUT/64-K/PM.II-10/AD/I/2010 ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Oditur militer dalam surat Dakwaannya. Dimana terkait perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Terdakwa dan Saksi-6 (Yuliana) dianggap merupakan perkawinan yang sah secara hukum oleh Majelis Hakim, sehingga unsur ke-2 “mengadakan perkawinan” dalam kesimpulannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu perkawinan yang sah secara hukum meskipun perkawinannya tersebut tidak dicatatkan.

Berdasarkan uraian di atas terkait analisis unsur ke-2 “mengadakan perkawinan” dalam perkara ini, yang menjadi landasan Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan ialah pendapat Majelis Hakim sebelum membacakan fakta-fakta yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menyimpulkan keterbuktian unsur ke-2 dalam perkara ini. Dimana Majelis

²Lihat pada pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang **Perkawinan** yang menyatakan “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Hakim berpendapat bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait syarat sahnya perkawinan merupakan pasal yang terpisah antara pasal 2 Ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) untuk menyatakan keberadaan dari pada suatu perkawinan. Jadi dalam hal ini apabila seseorang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dapat dianggap bahwa perkawinannya adalah sah dan dianggap ada secara hukum serta memiliki akibat hukum meskipun perkawinannya tidak dicatatkan seperti yang telah diatur di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁴

Berdasarkan uraian dari analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No.157k/mil/2010 yang menyimpulkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat dianggap sah dan ada secara hukum, maka penulis berpendapat bahwa hakim telah keliru mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas.

Penulis berpendapat bahwa suatu perkawinan dianggap sah dan ada secara hukum apabila perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan di dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dimana ketentuan

³Lihat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang **Perkawinan** yang Menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

⁴Lihat pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang **Perkawinan** Yang Menyatakan “Tiap-Tiap Perkawinan Dicatat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”

tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya di dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Peraturan lain yang mengatur mengenai keberadaan dari pada suatu perkawinan ialah Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.⁶ Selain itu di dalam Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷ Kemudian dilanjutkan di dalam Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁸ Sehingga pada kesimpulannya suatu perkawinan dianggap ada dan memiliki kekuatan hukum apabila telah memenuhi ketentuan yang telah diuraikan di atas yang berdasarkan kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu apabila perkawinannya telah dicatatkan dan dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

⁵Lihat Pada Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**

⁶Lihat Pada Pasal 5 Ayat (1) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang **Kompilasi Hukum Islam**

⁷Lihat pada Pasal 6 Ayat (2) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang **Kompilasi Hukum Islam**

⁸Lihat pada Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang **Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebutlah penulis memiliki pendapat bahwa Majelis Hakim dalam putusan 157k/mil/2010 telah keliru dalam memaknai keabsahan dan keberadaan suatu perkawinan secara hukum yang pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP meskipun perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan yang seharusnya perkawinannya tidak diakui keberadaannya secara hukum.

2. Putusan No.17k/mil/2012

a. Unsur Formil

Nama : AHMAD YUSUF
Pangkat/Nrp : Pratu / 310606662480287
Jabatan : Tayanmu Rai C
Kesatuan : Yonarmed 11/1/2 Kostrad
Tempat Lahir : Blora
Tanggal Lahir : 17 Februari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 11 Kostrad Magelang,
Jalan Kesatrian Kidul No.1 Magelang, Jawa
Tengah

b. Posisi Kasus

Terdakwa yang bernama Ahmad Yusuf merupakan anggota TNI AD berpangkat Pratu diajukan di muka Pengadilan Militer II-10 Semarang karenadidakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu dua puluh enam Juni dua ribu sepuluh, setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sepuluh, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Gang Arimbi Rt.03 Rw.04 Kelurahan Grogol, Kecamatan Sidomukti, Salatiga, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Gombang Rindam IV/Diponegoro dilanjutkan SustaArmed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada langsung ditugaskan di Yonarmed 11/Kostrad Magelang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP. 31060662480287.
2. Bahwa Pada hari tanggal lupa bulan Desember tahun 2007 Terdakwa dikenalkan lewat telepon/Hand Phone Sdri. Winarsih warga Blorayang

jugateman SMP Terdakwa yang kost di rumah Sdri. Ety Soemiyati (Saksi-1), setelah berkenalan Terdakwa sering berhubungan dan mengirim pesan singkat (SMS) melalui Hand Phone.

3. Bahwa pada bulan januari 2008 Terdakwa dan Saksi-1 sewaktu menginap di Hotel Merisa Bandungan, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali dalam semalam selanjutnya pada pagi harinya sebelum meninggalkan Hotel, Saksi-1 menyelesaikan pembayaran Hotel, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Semarang dan berpisah di Pasar Jatingaleh, Semarang.
4. Bahwa Akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada bulan Januari 2008 Saksi-1 positif hamil selanjutnya Saksi-1 menuntut Terdakwa untuk dinikahi karena waktu itu Terdakwa masih berpangkat Prada dan belum diijinkan untuk menikah, maka Terdakwa menikahi Saksi-1 dengan cara nikah siri secara agama Islam yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Enan Ahmad (Saksi-2) di Jalan Dr. Cipto Kampung Karang Tempel Utara No. 305 C Rt.01 Rw.04 Kelurahan Karang Turi, Semarang, adapun yang bertindak sebagai :

- Modin : Saksi-3 (Ahmad Khudlori) ;
- Saksi Nikah : Suwignyo ;
Sumartono (Almarhum) ;
Sugiarto ;
- Wali Nikah : Saksi-2 (Enan Ahmad) ;

- Mahar : Uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - Ijab Qobul : Dan juga tertuang dalam Surat Pernyataan Nikah ;
5. Bahwa perkawinan siri Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur kurang lebih 2 (dua) tahun bernama Abdiel Satya Yuda.
 6. Bahwa sejak bulan Februari 2007 Terdakwa kenal dengan Sdri. Aan Tripiyanti (Saksi-5) sewaktu Terdakwa masih tugas di Resimen Malang dan kemudian Terdakwa sering ke rumah Saksi-5 di Salatiga rata-rata sebulan sekali.
 7. Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa mengajukan Ijin Kawin di Kesatuan dengan Saksi-5 alamat Grogol Rt.03 Rw.IV Desa Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kodya Salatiga sesuai Surat Ijin Kawin Nomor SIK/16/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010, yang pelaksanaan nikahnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 di rumah orang tua Saksi-5 di Gang Arimbi Rt.03 Rw.04 Kelurahan Grogol, Kecamatan Sidomukti, Salatiga sesuai Akta Nikah Nomor 135/20/01/2010 tanggal 28 Juni 2010.
 8. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ety Soemiyati (Saksi-1) merupakan pengahalang yang sah bagi pernikahan Terdakwa yang kedua dengan Sdri. Aan Tripiyanti (Saksi-5).

Uraian kasus di atas merupakan dasar bagi Oditur Militer untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ketentuan pasal 279 Ayat 1 KUHP karena perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.Ety Soemiati merupakan penghalang yang sah bagi perkawinan Terdakwa yang kedua yang kedua dengan Sdri. Aan Tripiyanti (Saksi-5).

Dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan komulatif. Dakwaan komulatif kesatu yang didakwakan terkait pasal 279 Ayat (1) KUHP, dan dakwaan komulatif kedua yaitu pasal 9 ayat (1) Jo.Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004.

Dalam putusan No.17k/mil/2012 Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Semarang dan menyatakan bahwa judex facti telah benar dalam menerapkan hukum.

c. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan No.17k/mil/2012

Pada putusan No.17k/mil/2012 dalam putusannya Majelis Hakim Kasasi menyatakan tidak dapat menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Oditur Militer II-10 Semarang dan membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Oditur Militer II-10 Semarang tersebut merupakan permohonan kasasi terhadap putusan No.67-K/PM.II-10/AD/X/2011 pada tanggal 5 Desember 2011 atas Terdakwa yang oleh Oditur Militer diajukan di muka persidangan

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu Dakwaan kesatu pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 9 ayat (1) yo. Pasal 40 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004.

Dalam putusan No.67-K/PM.II-10/AD/X/2011 Majelis Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk”. Selain itu Majelis juga menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan kedua “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut”. Sehingga pada intinya putusan No.67-K/PM.II-10/AD/X/2011 membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang telah diajukan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Apabila kita melihat substansi dari pada penelitian ini terkait penerapan makna perkawinan yan sah dalam putusan No.17K/mil/2012 terkait penerapan pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang kita analisis terlebih dahulu adalah pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar memutus perkara di dalam Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan No.67-K/PM.II-10/AD/X/2011.

Dalam putusan No.17K/MIL/2012 terlebih dahulu dibacakan terkait pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam Peradilan di tingkat pertama dalam putusan No.67-K/PM.II-10/AD/X/2011 terkait perkara ini yaitu :

1. Perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Ety Soemiyati adalah sah menurut hukum Islam (Syari'ah) karena telah memenuhi hukum perkawinan.
2. Perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak didaftarkan ke KUA maupun diisbathkan di Pengadilan Negeri.
3. Berdasarkan keterangan Saksi ahli H. Zainal Fatah, Msi. Dalam kesaksiannya menyatakan bahwa perkawinan yang tidak didaftarkan atau tidak dicatatkan dianggap tidak terjadi suatu perkawinan atau dianggap tidak pernah ada perkawinan, oleh karenanya maka tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa (termasuk akibat dari perkawinan yang dilakukan tanpa pencatat yaitu tidak adanya kewajiban dan hak dari seorang suami, istri ataupun anak-anak mereka) dari seorang suami, istri, ataupun anak-anak mereka.
4. Menurut Drs. H. M. Anshary MK., S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia, menyatakan perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum dan konsekuensi hukum terhadap

- kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami istri, kejelasan terhadap anak dan kewajiban orang tua terhadap anak.
5. Menurut Prof. Dr. A. Gani Abdullah, S.H. menyatakan “Oleh karena perkawinan di bawah tangan tidak mengikuti hukum yang berlaku (ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan), perkawinan semacam itu tidak mempunyai kepastian hukum dan kekuatan hukum dan karenanya tidak pula dilindungi oleh hukum”.
 6. Berdasarkan pasal 6 ayat (2) jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan Perkawinan yang dilakukan dan tidak dicatat tidak mempunyai akibat hukum dan perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
 7. Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Eti Soemiyati yang dilakukan menurut hukum Islam tersebut tidak didaftarkan di KUA serta tidak diisbathkan ke Pengadilan Agama, meskipun sudah sah hukumnya menurut agama namun belum sah secara administrasi dengan kata lain belum diakui oleh Negara sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.
 8. Perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Ety Soemiyati jika dipandang dari hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

9. Karena perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Ety Soemiyati tersebut dianggap tidak ada, maka hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa pun tidak menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami istri, kejelasan terhadap hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
10. Oleh karena itu maka perkara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Ety Soemiyati yang menjadi perkara ini dianggap tidak ada.

Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim dalam putusan No.67-K/PM.II-10/AD/X/2011 maka dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum pasal 279 Ayat (1) ke-1 seperti yang telah didakwakan oleh Oditur Militer pada pengadilan tingkat Pertama pada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Pertimbangan Majelis Hakim di atas yang menjadi landasan Majelis untuk menyimpulkan terkait keterbuktian atas unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP. Apabila kita cermati pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut, maka terlihat jelas yang menjadi salah satu dasar pertimbangan Hakim dalam memutus

adalah pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait syarat sah perkawinan. Majelis hakim dalam putusan No.67-K/PM.II-10/AD/X/2011 menafsirkan bahwa pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan pasal yang berkaitan antara Ayat (1) dan Ayat (2) terkait syarat sah nya perkawinan. Sehingga pada intinya Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan secara agama masing-masing dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan.⁹

Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.Ety Soemiyati dianggap tidak pernah terjadi perkawinan dan dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan.

Selain dari pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis dalam pertimbangannya juga berlandaskan kepada Kompilasi Hukum Islam khususnya pada pasal 6 ayat (2) jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana pada intinya setiap perkawinan yang terjadi menurut hukum islam wajib dilakukan dihadapan pengawas

⁹Lihat pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang **Perkawinan** yang menyatakan bahwa “

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

pencatat nikah.¹⁰ Apabila tidak dilakukan dihadapan pencatat nikah maka dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama.¹¹

Selain dari pada Hukum Positif yang berlaku, Majelis hakim juga mempertimbangkan pendapat para Ahli terkait syarat sah suatu perkawinan. Dimana dari pendapat para pakar tersebut, Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Pertama mengambil kesimpulan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan pencatatan.

Dalam putusan No.17K/mil/2012 selain pertimbangan-pertimbangan dari putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim kasasi memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait permohonan kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap putusan No.67-K/PM.II-10/AD/X/2011 yang diputus pengadilan pada tingkat pertama pada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan dari majels hakim kasasi yaitu:

1. Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum
2. Terdakwa telah melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi

Ety Soemiyati, dan pernikahan tersebut dilakukan secara islam, maka pernikahan tersebut pada dasarnya sah, tetapi dalam fakta persidangan, pernikahan tersebut bukan atas kehendak

¹⁰Lihat pada pasal 6 Ayat (2) **Kompilasi Hukum Islam** yang mengatakan bahwa “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”

¹¹ Lihat pada pasal 7 Ayat (2) **Kompilasi Hukum Islam** yang menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”

Terdakwa, tetapi atas tekanan pihak Saksi Ety Soemiyati, karena pernikahan yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak dalam perkawinan, perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan.

3. Pihak Saksi Ety Soemiyati selalu mendesak untuk dinikahi secara resmi, menunjukkan bahwa pihak Ety Soemiyati sadar perkawinan sirinya dengan Terdakwa tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Kasasi di atas, yang menjadi landasan Majelis Hakim Kasasi untuk mengambil keputusan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer terkait Dakwaan pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dapat kita lihat bahwa Majelis Hakim Kasasi juga melihat dari sudut pandang perkawinan secara Hukum Islam.

Majelis berpendapat bahwa tidak ada perkawinan antara pihak Terdakwa dengan Saksi Ety Soemiyati karena apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Islam bahwa dalam melakukan suatu perkawinan harus didasari oleh kehendak pihak yang terkait. Sehingga tidak diperbolehkan adanya paksaan untuk melaksanakan suatu perkawinan. Hal itu yang menjadi tolak ukur Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut. Secara tidak langsung Majelis Hakim Kasasi menganggap bahwa antara pihak Terdakwa dan Saksi Ety Soemiyati tidak terjadi suatu ikatan perkawinan dikarenakan hal tersebut.

Pendapat tersebut juga dikuatkan dengan pendapat dari Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa Saksi Ety Soemiyati selalu mendesak kepada Terdakwa untuk dinikahi secara resmi sehingga patut diduga bahwa Saksi Ety Soemiyati sendiri selaku pihak yang terkait juga menyadari bahwa tidak ada ikatan perkawinan yang sah secara hukum dengan Terdakwa.

Berdasarkan uraian analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan 17k/mil/2012 di atas, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah benar dalam memutuskan terkait perkawinan yang tidak dicatatkan pada perkara yang menyangkut pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu perkawinan dianggap sah dan ada secara hukum apabila telah memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan khususnya pasal 2 Undang-Undang No,1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dengan dasar pertimbangan yang lain yaitu Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya suatu perkawinan selain sah secara agama juga wajib dilakukan pencatatan. Berdasarkan hal tersebut perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perkara tersebut dianggap tidak sah dan tidak ada secara hukum positif Indonesia, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu melanggar ketentuan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Pemaknaan Perkawinan Yang Sah Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Dapat Menjadikan Kepastian Hukum Dalam Putusan No.157K/MI/2010 dan No.17K/MIL/2012 Terkait Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 Terhadap Kasus Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Pengertian perkawinan telah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia.

Suatu perkawinan dianggap ada apabila telah terpenuhi syarat-syarat dari sahnya perkawinan berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terkait syarat dari sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2). Dimana suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing serta kemudian perkawinannya dicatatkan.¹²

Apabila kita melihat analisis dari putusan No.157k/mil/2010 dan putusan No.17k/mil/2012 terdapat perbedaan penerapan makna syarat sahnya perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga perkawinan yang

¹²Lihat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**

tidak dicatatkan dalam kedua perkara tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda dalam hal penerapan pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusan No.157k/mil/2010 Majelis Hakim memaknai syarat sahnya perkawinan yang terdapat dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pasal 2 terkait syarat sahnya perkawinan merupakan pasal yang terpisah antara Ayat (1) dan (2) sehingga apabila seseorang telah melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan dalam agama dan keyakinannya masing-masing meskipun perkawinannya tidak dicatatkan, maka perkawinannya tersebut dianggap sah secara hukum. Sedangkan dalam putusan 17k/mil/2012 Majelis hakim Hakim memaknai syarat sahnya perkawinan yang terdapat dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pasal 2 terkait syarat sahnya perkawinan merupakan satu kesatuan antara Ayat (1) dan ayat (2), sehingga apabila suatu perkawinan yang dilakukan sah secara agama tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak dianggap ada dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kemudian menjadikan perkawinan tersebut tidak memiliki akibat apapun di dalam hukum itu sendiri.

Makna pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait syarat sahnya perkawinan, dapat kita analisis dari latar belakang atau sejarah terbentuknya pasal 2 dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut. Pada awalnya, sebelum ada atau diundangkannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dibentuk Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUU Perkawinan) pada tahun 1973. Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut diatur beberapa hal terkait perkawinan yang ada di

Indonesia, salah satu yang diatur ialah terkait syarat sahnya perkawinan yang ada pada pasal 2 RUU Perkawinan.

Syarat sahnya perkawinan berdasarkan Pasal 2 RUU Perkawinan menyebutkan sebagai berikut :¹³

“(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

(2) Pencatatan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat negara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersebut.”

Selanjutnya diberi penjelasan pasal pada halaman Penjelasan tentang RUU Perkawinan yang pada hal ini penjelasan Umum nomor 3 huruf b yang menyatakan sebagai berikut :¹⁴

“Dalam Undang-undang ini dinyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Dengan demikian, maka pengantar Agama yang melangsungkan perkawinan antara golongan-golongan Agama perlu dilihat dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pencatat perkawinan yang merupakan salah satu aspek dalam pencatatan sipil. Pencatatan sipil seperti diketahui bertujuan untuk menyatakan dengan bahan-bahan yang bersangkutan status seseorang.

Untuk itu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dinyatakan dalam surat-surat keterangan, akta-akta yang dimuat dalam daftar pencatatan sipil tersebut.

Maka apabila seorang pengantar Agama mencatat perkawinan antara mereka yang menganut suatu Agama, berfungsilah ia sebagai seorang

¹³Lihat pada pasal 2 Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973

¹⁴Lihat pada Penjelasan Umum Nomor 3 Huruf b Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973.

pejabat negara dan selaku pencatat perkawinan, yang menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum.

Dengan demikian, maka perkawinan menurut Adat sebagai tersebut diatas diakui, tetapi perlu diadakan persyaratan untuk sahnya perkawinan suatu pencatatan. Sebelum adanya suatu peraturan perundang-undangan, maka yang diperlukan adalah peraturan yang ada.

Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, kantor-kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanya diadakan pembedaan antara warga negara Indonesia dan orang asing. Bagi mereka yang tidak termasuk golongan yang telah ada peraturan pencatatan perkawinan dan perceraian dibuka kemungkinan untuk mencatatkan perkawinan dan perceraianya di Kantor Catatan Sipil.”

Kemudian dilanjutkan kembali pada penjelasan Pasal Demi Pasal, yakni terkait dengan Pasal 2 adalah sebagai berikut :¹⁵

“(1) Sahnya perkawinan ialah apabila dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pencatatan tersebut dilakukan menurut peraturan tentang pencatatan perkawinan yang berlaku bagi calon mempelai yang bersangkutan.

Sementara peraturan tentang catatan sipil yang bersifat umum dan nasional belum ada maka pencatatan perkawinan dapat dilakukan baik oleh pencatat sipil berdasarkan peraturan yang ada maupun oleh pengantar Agama yang berfungsi pula sebagai pencatat sipil, yang diangkat menurut peraturan yang berlaku.

Pengantar Agama termaksud sebulan sekali untuk kepentingan administrasi mengirimkan keterangan mengenai apa yang dicatat kepada pencatat sipil.

Bagi orang-orang yang tidak termaksud dalam golongan yang telah ada peraturan pencatatan perkawinan dan perceraian dibuka kemungkinan untuk mencatatkan perkawinan dan perceraianya pada Kantor Catatan Sipil.

¹⁵Lihat pada penjelasan pasal demi pasal terkait pasal 2 Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973.

repository.ub.ac.id

Ketentuan hukum perkawinan yang ada dewasa ini, adalah sebagai berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
 - b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
 - c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks ordonnantie Christen Indonesiers* (Stbl. [singkatan dari *Statblaad*] 1933 – Nomor 74);
 - d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
 - f. Bagi orang-orang Eropah dan warga negara Indonesia keturunan Eropah dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Bila semua ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini telah dipenuhi, maka dengan tindakan tersebut perkawinan menjadi sah.

(2) Cukup jelas.”

Apabila kita melihat pasal 2 RUU perkawinan yang akhirnya menjadi dasar dalam pembentukan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baik dari penjelasan secara umum maupun penjelasan pasal demi pasal dapat kita lihat bahwa suatu perkawinan diharuskan dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan untuk dapat mendapat pengakuan di dalam hukum itu sendiri sehingga dapat diakui bahwa perkawinannya adalah sah.

Dalam kaitannya dengan pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 terkait syarat sah perkawinan berdasarkan sejarahnya maka patutnya sebuah perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan secara agama dan keyakinannya masing-masing dan kemudian dicatatkan berdasarkan ketentuan yang ada pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga suatu perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum dan diakui keberadaannya

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

sebagai suatu perkawinan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan keyakinan masing-masing, serta dicatatkan. Maka suatu perkawinan dianggap ada apabila telah memenuhi ketentuan yang telah dijabarkan dari analisis makna pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas berdasarkan kepada latar belakang terbentuknya undang-undang tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada rumusan masalah beserta uraian hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terjadinya perbedaan penerapan makna perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada putusan No.157k/mil/2010 dan No.17k/mil/2012 terkait penerapan pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap kasus perkawinan yang tidak dicatatkan dikarenakan perbedaan-perbedaan dasar pertimbangan hakim serta perbedaan sudut pandang hakim terhadap pemaknaan pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait syarat sahnya perkawinan. Dimana dalam putusan No.157k/mil/2010 atas nama Terdakwa Sumarno, dalam kaitannya dengan perkawinan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Yuliana yang pada fakta hukumnya hanya dilakukan secara agama dan tidak dicatatkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinannya tersebut adalah sah dan dipandang ada secara hukum sehingga memiliki akibat hukum yang akhirnya dapat terpenuhi unsur dalam pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan sebagai pasal

yang terpisah antara ayat (1) dan ayat (2). Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan yang sah secara agama meskipun tidak dicatatkan berdasarkan ketentuan pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dinyatakan bahwa perkawinannya sah secara hukum serta mempunyai kekuatan dan akibat hukum.

Sedangkan dalam putusan 17k/mil/2012 terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Terdakwa Achmad Yusuf dengan Sdri. Ety Soemiyati Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinannya tidak dianggap ada secara hukum dikarenakan perkawinannya tersebut tidak dicatatkan dan hanya dilakukan secara agama atau sah secara agama. Dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim memandang pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait Syarat sahnya perkawinan merupakan satu kesatuan antara ayat (1) dan Ayat (2). Sehingga suatu perkawinan yang sah dan dipandang ada secara hukum serta memiliki akibat hukum ialah perkawinan yang dilakukan sah secara agama dan dilakukan pencatatan sebagaimana telah diatur di dalam pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari uraian analisis kedua putusan diatas yaitu putusan No.157k/mil/2010 dan putusan No.17k/mil/2012 dapat disimpulkan bahwa di dalam putusan No.157k/mil/2010 Majelis Hakim telah keliru dalam memaknai terkait keberadaan suatu perkawinan untuk memenuhi unsur yang ada di dalam pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP terkait perkawinan yang tidak dicatatkan. Sedangkan dalam putusan 17k/mil/2012 Majelis Hakim

telah benar dalam memaknai terkait keberadaan suatu perkawinan yang didasarkan kepada ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP terkait perkawinan yang tidak dicatatkan.

2. Terkait pemaknaan syarat sah perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam putusan 157k/mil/2010 dan 17k/mil/2012 terkait penerapan pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, dapat disimpulkan berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya dimana analisis terkait pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dilihat dari sudut pandang sejarahnya, maka dapat disimpulkan bahwa pasal 2 Ayat (1) dan (2) terkait syarat sahnya perkawinan merupakan pasal yang ayat (1) dan Ayat (2) dalam Undang-Undang tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah untuk menyatakan keabsahan dari pada suatu perkawinan sehingga jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah atau dianggap tidak ada secara hukum.

Sehingga apabila kita lihat dari hasil analisis kedua putusan di atas, maka pemaknaan yang sesuai terkait syarat sahnya perkawinan berdasarkan pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam penerapan pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan yang bertujuan untuk menciptakan kepastian dan keadilan didalam penerapan hukum itu sendiri telah tercermin pada putusan No.17k/mil/2012 dimana Majelis Hakim tidak mengakui keberadaan dari

pada perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Yusuf dengan Sdri. Ety Soemiyati.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis telah merumuskan beberapa saran terkait hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu :

1. Saran ini ditujukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku lembaga pembuat Undang-Undang untuk dapat memperjelas atau mengkaji lebih dalam pasal 279 Ayat (1) KUHP serta Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dalam penerapannya terhadap pasal 279 Ayat (1) KUHP yang juga terkait dengan syarat sahnya perkawinan sebagai bentuk keabsahan suatu perkawinan sebagai salah satu unsur yang terdapat dalam pasal 279 Ayat (1) KUHP tersebut tidak terjadi perbedaan penafsiran dari para Aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan.
2. Bagi Hakim selaku ujung tombak dari penentu keadilan di dalam hukum harus lebih berhati-hati untuk menafsirkan suatu pasal sehingga setiap putusan yang diputuskan dapat menciptakan rasa adil dan memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat di dalam penerapan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Jayadi, 2012, **Fenomena Nikah Sirri Prespektif Makna Pelaku Nikah Sirri**, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2008, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Amzulian Rifa'i, Suparman Marzuki, Andrey Sujatmoko, 2018, **Wajah Hakim Dalam Putusan (Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia)**, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2008, **Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, **Fiqh Munakahat 1**, Pustaka SetiaCet. VII Bandung.
- Hartono, 2010, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, **Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- H. Rusli Muhammad, 2007, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2010, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)**, Mandar Maju, Bandung.
- MR Martiman Prodjohamidjojo, 2011, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Karya Gemilang, Jakarta.
- Moch. Isnaeni, 2016, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Refika Aditama, Bandung.

- repository.ub.ac.id
- M. Yahya Harahap, 2000, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 2010, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, **Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**, Airlangga University, Surabaya
- Tolib Effendi, 2014, **Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia**, Setara Press, Malang.
- Tri Andrisman, 2010, **Hukum Acara Pidana**, Lampung, Universitas Lampung.

JURNAL

- Sartini, Abdul Bari Azed, Suzanalisa, **Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana**, Legalitas Edisi Juni 2016, Volume VIII, Nomor 1
- Selamat Widodo, **Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan Oleh Prajurit TNI**, Jurnal Kosmik Hukum Edisi Juni 2016, Vol.16 NO.2
- Tengku Erwinsyahbana, **Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila**, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1, Hlm 1

PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 **Tentang Perkawinan**
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang **Kompilasi Hukum Islam**
- Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang **Kekuasaan Kehakiman**
- UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973

INTERNET

Ustman Ali, 4 Maret 2015, **Pengertian Dan Tujuan Pernikahan (Perkawinan)**

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html> diakses pada tanggal 24 April 2018 Pukul 20.10 WIB

